

**TESIS**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
PADA PENANGANAN PENAMBANGAN  
BATU BARA ILEGAL DI KOTA SAMARINDA**



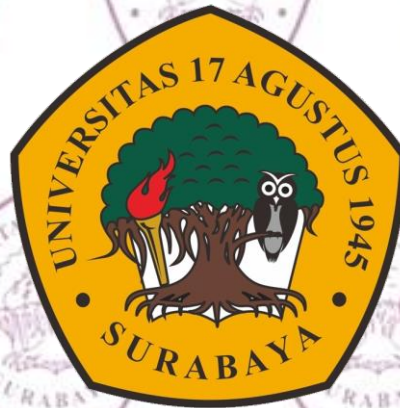
Oleh:

**ANGKASA JAYA DJOERANI**  
NBI: 1162000020

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**TESIS**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
PADA PENANGANAN PENAMBANGAN  
BATU BARA ILEGAL DI KOTA SAMARINDA**



Oleh:

**ANGKASA JAYA DJOERANI**

**NBI: 1162000020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**



Lembar Pengesahan

USULAN PENELITIAN TESIS YANG TELAH DIUJI

PADA TANGGAL, 21 juni 2022


Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Arif Darmawan, SU

NPP. 20110.90.0215

  
Dr. Tri Yuliyanti, M.Si

NPP. 20130.92.0394

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mengetahui:

Dekan

  
Dr. Ayu Maduwinarti, M.P

NPP. 20120.87.0103

Mengesahkan:

Kaprodi

  
Prof. Dr. Agus Sukrityanto, MS

NPP. 20120.90.0203

**PENELITIAN TESIS INI TELAH DIUJI DAN DINILAI  
OLEH PANITIA PENGUJI PROGRAM MAGISTER  
ILMU ADMINISTRASI**

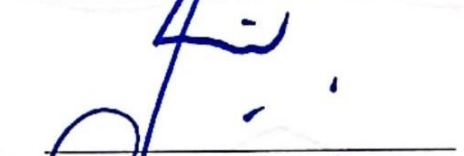
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
PADA TANGGAL,**

Tim Penguji,

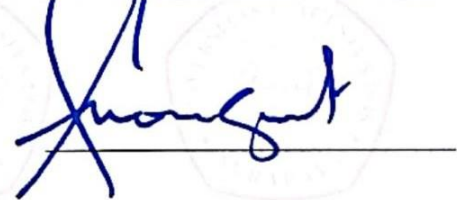
Prof. Dr. Arif Darmawan, SU



Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM



Dr. IGN. Anom Maruta, MM



Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS  
NIP: 201120900203



**PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

N a m a : Angkasa Jaya Djoerani  
Alamat : Jalan Jakarta Blok AK No. 10 Loa Bakung Kota Samarinda.  
Email : jayadeje@gmail.com  
Tilpon / Hp : 08125533767

Dengan ini saya menyatakan karya tulis yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pemerintah Pada Penanganan Penambangan Batu Bara Ilegal Di Kota Samarinda** adalah murni gagasan, rumusan, pemikiran dan penelitian saya sendiri. Semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Demikian pernyataan ini saya dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi kode etik atau sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku pada dunia Pendidikan.

Surabaya, Juni 2022

Yang membuat pernyataan



**Angkasa Jaya Djoerani**

NIM : 1162000020



U N I V E R S I T A S  
17 AGUSTUS 1945  
S U R A B A Y A

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TLP. 031 593 1800 (EX 311)  
EMAIL: PERPUS@UNTAG-SBY.AC.ID.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angkasa Jaya Djoerani  
Fakultas : Fisip  
Program Studi : Program Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA PENANGANAN  
PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI KOTA SAMARINDA**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal :

Yang Menyatakan



Angkasa Jaya Djoerani

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadlirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA PENANGANAN PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI KOTA SAMARINDA.

Tesis ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Arif Darmawan, SU, selaku Pembimbing I
2. Dr. Tri Yuliyanti, M.Si, selaku Pembimbing II
3. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Ayun Maduwinarti, MP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Prof. Dr. Agus Sukristiyanto, MS, selaku Kaprodi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak dan ibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bimbingannya selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Para staf tata usaha baik umum dan akademik atas bantuannya yang telah memberikan informasi kepada penulis selama ini.
8. Para Nara Sumber baik dari lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tokoh-tokoh masyarakat, aktivis lingkungan dan masyarakat terdampak yang telah menyampaikan informasi dan data selama penulis menyusun tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Magister Administrasi Publik pada umumnya khususnya angkatan 52 yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah.
10. Rekan-rekan kerja, pimpinan dan staf yang telah banyak memberikan dukungan, saran dan data yang diperlukan selama penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan yang membacanya. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan melindungi kita semua, Aamiin Yaa Robbalalamiin.

Surabaya, 21 Juni 2022  
Penulis

Angkasa Jaya Djoerani



## **ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda serta mengetahui dan mendeskripsikan regulasi yang berlaku dalam penegakan hukum pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda dilihat dari empat hal. Pertama, Komunikasi; di mana tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pertambangan peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara detail tentang perizinan penambangan sehingga angka penambangan ilegal di Kota Samarinda semakin meningkat. Kedua, Sumberdaya; di mana sumber daya yang ada pada kebijakan penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda adalah pemerintah daerah, bagian perizinan dan bagian pengawasan. Ketiga, Disposisi; di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan hal seperti yang sudah di atur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Keempat, Struktur birokrasi; di mana terdapat SOP atau prosedur dalam pengurusan perizinan usaha pertambangan yang diberikan oleh Dinas ESDM Kalimantan Timur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku dalam penegakan hukum pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam wilayah Kota Samarinda.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Batu Bara Ilegal

## **ABSTRACT**

The purpose of this study is to find out and describe the implementation of government policies on handling illegal coal mining in Samarinda City and to know and describe the regulations that apply in law enforcement on handling illegal coal mining in Samarinda City. Data analysis was performed with interactive models from Miles and Huberman. The results showed that the government's policy on handling illegal coal mining in Samarinda City was seen from four things. First, Communication; where there is no socialization carried out by the government regarding mining, Governor regulation number 4 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Non-Metal and Rock Mineral Mining Business Permits. This condition causes the public not to know in detail about mining permits so that the number of illegal mining in Samarindak City is increasing. Second, Resources; where the resources in the policy of handling illegal coal mining in Samarinda City are the local government, the licensing section and the supervision section. Third, Disposition; where the local government has the authority in terms of granting Mining Business Permits as stipulated in Law No. 4 of 2009. Fourth, Bureaucratic structure; where there are SOPs or procedures in the management of mining business permits granted by the East Kalimantan ESDM Office. The results of the study also showed that the regulation that applies in law enforcement on handling illegal coal mining in Samarinda City is Samarinda City Regional Regulation Number 12 of 2013 concerning Mineral and Coal Mining within the Samarinda City area.

Keywords: Implementation, Policy, Illegal Coal

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Teori Yang Digunakan.....	12
2.2.1 Kebijakan Publik.....	12
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	19
2.2.3 Pertambangan Ilegal.....	28
2.3 Critical Review.....	30
<b>BAB III PROSEDUR PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1 Landasan Filosofi dan Pendekatan Penelitian.....	31
3.2 Objek dan Informan Penelitian.....	31
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.4 Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Samarinda.....	35
4.1.1 Profil Kota Samarinda.....	35
4.1.2 Geografi Kota Samarinda.....	35



4.1.3 Demografi Kota Samarinda.....	36
4.1.4 Kebudayaan di Kota Samarinda.....	36
4.1.5 Pemerintahan Kota Samarinda.....	36
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
5.1 Implementasi Kebijakan Pemerintah Pada Penanganan Penambangan Batu Bara Ilegal di Kota Samarinda .....	39
5.1.1 Penyajian Data.....	39
5.2 Regulasi yang Berlaku Dalam Penegakan Hukum Pada Penanganan Penambangan Batu Bara Ilegal di Kota Samarinda .....	45
5.2.1 Penyajian Data.....	45
5.3 Pembahasan.....	46
5.3.1 Implementasi Kebijakan Pemerintah Pada Penanganan Penambangan Batu Bara Ilegal di Kota Samarinda .....	47
5.3.2 Regulasi yang Berlaku Dalam Penegakan Hukum Pada Penanganan Pengembangan Batu Bara Ilegal di Kota Samarinda .....	51
5.3.2.1 Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah.....	52
5.3.2.2 Pengawasan dan Pembinaan.....	52
5.3.2.3 Penanganan Konflik .....	53
5.3.2.4 Pengawasan Terhadap Dampak Lingkungan .....	54
5.3.2.5 Penyebab Penambangan Batu Bara Secara Ilegal di Kota Samarinda .....	55
<b>BAB VI TEMUAN PENTING DAN PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
6.1 Temuan Penting .....	61
6.2 Implikasi Penelitian .....	62
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
7.1 Kesimpulan .....	63
7.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Kebijakan Publik menurut Ripley .....	16
Gambar 2. Implementasi Kebijakan George Edward III .....	21
Gambar 3. Model interaktif dari Miles dan Huberman.....	33
Gambar 4. Studi lapangan kelokasi Penambangan Batu Bara di kelurahan Sambutan di Kota Samarinda.....	62
Gambar 5. Pengambilan data wawancara dengan Kadis Lingkungan Hidup Kota Samarinda.....	69
Gambar 6 Pengambilan Daat Melakukan Diskusi Lapangan Bersama Inspektur Tambang Provinsi, Dinas LIngkungan Hidup, Pemilik Izin Usaha Pertambangan .....	70

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Instansi Terkait .....	58
---------------------------------------------------------------------	----